



Research Article

Pembiayaan Pendidikan dalam Pengembangan Sistem Pendidikan Islam

Rita Nurjanah¹, Hasan Basri², Nurhayati³, Siti Romlah⁴

1. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Indonesia

E-mail: ritanurjanah826@gmail.com 

2. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Indonesia

E-mail: hasanbasri@uinsgd.ac.id

3. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah At-Taqwa Ciparay, Indonesia

E-mail: nur.nurhayati972@gmail.com

4. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah At-Taqwa Ciparay, Indonesia

E-mail: sitiromlahfanani@gmail.com



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : December 24, 2024

Revised : June 15, 2025

Accepted : August 12, 2025

Available online : October 10, 2025

How to Cite: Rita Nurjanah, Hasan Basri, Nurhayati, N. and Siti Romlah (2025) "Financing Education in the Development of the Islamic Education System", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(4), pp. 87–102. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i4.1742.

Financing Education in the Development of the Islamic Education System

Abstract. This research aims to identify a legal basis, sources, components and challenges in the management of Islamic education financing, and offer solutions to these problems. The method used

is a qualitative approach to analyze related issues and produce strategic recommendations to improve the effectiveness of Islamic values-based education programs. The results show that the legal basis of Islamic education financing is based on the National Education System Law No 20 of 2003 and Minister of National Education Regulation No 69 of 2009. The financing components include investment, operational and personal costs. Challenges in management include limited funding sources, high education costs, and lack of transparency and accountability. To overcome these issues, the researchers recommend diversifying sources of financing, improving accountability and developing a financing plan. The findings are expected to make a significant contribution to Islamic education policy in Indonesia and serve as a reference for educational institutions in designing more effective financing strategies.

Keywords: Challenges, Education Financing, Legal Basis

PENDAHULUAN

Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu aspek krusial dalam pengembangan sistem pendidikan, termasuk dalam konteks pendidikan Islam. Pendidikan Islam tidak hanya bertujuan untuk mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk karakter dan akhlak peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, pembiayaan yang memadai menjadi sangat penting. Di era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, tantangan dalam pembiayaan pendidikan semakin kompleks. Banyak lembaga pendidikan Islam yang menghadapi kesulitan dalam mendapatkan sumber dana yang cukup untuk operasional dan pengembangan program pendidikan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai mekanisme pembiayaan pendidikan Islam, baik dari segi sumber, model, maupun kebijakan, menjadi sangat penting untuk diperhatikan.

Kondisi ideal pendidikan Islam adalah ketika setiap aspek pendidikan dapat didanai secara memadai dan berkelanjutan. Ini mencakup pengadaan fasilitas fisik seperti Gedung sekolah, laboratorium, dan peralatan belajar yang berkualitas. Selain itu, gaji guru dan staf pendidikan harus cukup untuk menarik dan mempertahankan tenaga pengajar yang berkualitas. Sumber pembiayaan yang optimal berasal dari kombinasi zakat, infak, wakaf, yayasan, sumbangan masyarakat, dan dana pemerintah. Untuk memastikan bahwa data tersebut digunakan secara efektif dan efisien, sangat penting untuk melakukan penelitian yang menyeluruh dan transparan saat menangani data. Dengan demikian, pendidikan Islam dapat berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat.

Pembiayaan pendidikan Islam mencerminkan tanggung jawab negara dan masyarakat dalam menyediakan pendidikan. Dalam perspektif Islam, negara bertanggung jawab penuh atas pembiayaan pendidikan, termasuk gaji guru dan infrastruktur¹, dengan harapan menyediakan pendidikan gratis untuk semua warga. Di Indonesia, sumber pembiayaan berasal dari pemerintah, yayasan, komunitas, dan donasi internasional, seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Beasiswa

¹ Ahmad Munir, "Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Perspektif Islam," *At-Ta'dib* 8, no. 2 (2013): 138-48, <https://doi.org/10.21111/at-tadib.v8i2.502>.

Siswa Miskin (BSM)². Banyak pesantren juga beroperasi secara mandiri dengan mengandalkan iuran santri dan sumbangan masyarakat³. Manajemen keuangan dalam lembaga pendidikan harus transparan dan akuntabel, namun tantangan utama adalah keterbatasan sumber dana yang dapat diakses. Oleh karena itu, kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas dan memastikan keberlanjutan program pendidikan Islam.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek di atas, jelas bahwa pembiayaan pendidikan Islam memegang peranan penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan. Oleh karena itu, perhatian serius terhadap mekanisme pembiayaannya harus menjadi prioritas bagi semua pemangku kepentingan mulai dari pemerintah hingga masyarakat agar tujuan luhur dari pendidikan Islam dapat tercapai secara optimal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Pembiayaan Pendidikan Islam

Dasar hukum pembiayaan pendidikan Islam mencakup beberapa peraturan penting yang menjadi landasan kuat bagi pelaksanaan pendidikan agama Islam. Pertama, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 yang menjadi landasan hukum utama bagi pembiayaan pendidikan di Indonesia, termasuk pendidikan agama Islam. Dalam pasal 46, disebutkan bahwa sumber pendanaan pendidikan harus berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan alokasi minimal 20%⁴. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi seluruh masyarakat.

Kedua, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 69 Tahun 2009 mengatur standar biaya operasional satuan pendidikan, termasuk pendidikan agama Islam, yang harus diikuti oleh lembaga pendidikan⁵. Peraturan ini menetapkan pedoman yang jelas mengenai alokasi dana untuk berbagai kebutuhan operasional, seperti gaji guru, perawatan fasilitas, dan pengadaan bahan ajar. Dengan adanya standar ini, diharapkan setiap lembaga pendidikan dapat mengelola dana secara efisien dan transparan, sehingga kualitas pendidikan dapat terjaga dan terus meningkat. Selain itu, peraturan ini juga memastikan bahwa lembaga pendidikan agama Islam mendapatkan perhatian yang setara dalam hal pembiayaan, sehingga mereka dapat menyediakan pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan bagi para siswa.

² Adinda Fitri Ramadhani and Saifuddin, "Manajemen Pembiayaan Dalam Pendidikan Islam," *International Seminar On Islamic ...* 3 (2023): 129-39, <https://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/isiep/article/view/3860> <https://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/isiep/article/download/3860/2446>.

³ Edi Warmanto, "Pembiayaan Pendidikan Islam," *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 1 (2024): 29-37.

⁴ Eva Febriani, Muhammad Syaifuddin, and Syafaruddin Syafaruddin, "Kebijakan Pemerintah Tentang Standar Pembiayaan Pendidikan Agama Islam," *Journal of Islamic Education El Madani* 2, no. 2 (2023): 114-20, <https://doi.org/10.55438/jiee.v2i2.65>.

⁵ Febriani, Syaifuddin, and Syafaruddin.

Sumber Pembiayaan Pendidikan Islam

Pembiayaan pendidikan Islam berasal dari berbagai sumber yang beragam dan penting untuk memastikan keberlanjutan dan kualitas pendidikan.

1. Dana Pemerintah

Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemerintah memberikan alokasi khusus untuk pendidikan⁶. Dana ini digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pendidikan, seperti pembangunan infrastruktur, gaji guru, dan pengadaan bahan ajar. Alokasi dana dari pemerintah ini sangat penting untuk menjamin bahwa pendidikan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Alokasi dana pendidikan dari APBN terbagi menjadi beberapa bagian, di mana sebagian besar dikelola oleh pemerintah daerah. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) hanya mengelola sekitar 3% dari total alokasi tersebut, sementara sisanya dialokasikan untuk transfer ke daerah dan lembaga lain seperti Kementerian Agama (Kemenag). Pada tahun 2024, total anggaran pendidikan diperkirakan mencapai Rp 664,02 triliun, dengan alokasi terbesar untuk transfer ke daerah dan dana desa sebesar 52,11% atau Rp 346,56 triliun. Berikut adalah beberapa contoh utama mengenai sumber pembiayaan yang berasal dari dana pemerintah :

a. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang bertujuan untuk membantu pembiayaan operasional sekolah, termasuk madrasah. Program ini disediakan oleh pemerintah untuk membantu pembiayaan operasional sekolah, termasuk madrasah. Dana BOS digunakan untuk berbagai keperluan seperti gaji guru, pengadaan bahan ajar, dan kegiatan ekstrakurikuler⁷. Penyaluran dana BOS dilakukan melalui aplikasi OM SPAN yang dikembangkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) bersama dengan Badan Keuangan Daerah Pemda. Setiap KPPN memiliki aplikasi OM SPAN yang disesuaikan dengan level kapasitas masing-masing untuk mendukung penyaluran dana BOS secara efektif.

Selain itu, pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dana BOS melalui laman bos.kemdikbud.go.id, di mana laporan penggunaan dana harus disubmit secara daring untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Dengan demikian, program Dana BOS tidak hanya membantu membiayai operasional sekolah secara teknis, tetapi juga meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan melalui dukungan yang sistematis dan transparan.

b. Bantuan Siswa Miskin (BSM)

Program ini memberikan bantuan kepada siswa dari keluarga kurang mampu untuk mendukung biaya pendidikan mereka. BSM bertujuan untuk mengurangi angka putus sekolah dan memastikan akses pendidikan yang lebih baik bagi

⁶ Febriani, Syaifuddin, and Syafaruddin.

⁷ Warmanto, "Pembiayaan Pendidikan Islam."

semua lapisan Masyarakat⁸. Melalui BSM, siswa yang berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang beruntung dapat menerima bantuan finansial yang signifikan, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar dalam proses belajar mengajar, seperti pembelian buku, alat tulis, dan biaya transportasi ke sekolah. Sasaran utama dari program BSM adalah peserta didik di jenjang pendidikan dasar hingga menengah, termasuk Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah. Setiap siswa yang memenuhi kriteria berhak menerima bantuan yang bervariasi tergantung pada jenjang pendidikan mereka.

Dalam pelaksanaannya, program BSM mengikuti sejumlah regulasi dan landasan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah, termasuk Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah terkait pendanaan pendidikan. Untuk memastikan dana BSM tepat sasaran, pihak sekolah bersama dengan komite sekolah melakukan seleksi terhadap calon penerima berdasarkan kriteria tertentu, seperti pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Dengan demikian, program BSM diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu dan membantu mereka menyelesaikan pendidikan hingga tingkat yang lebih tinggi.

c. Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Kartu Indonesia Pintar (KIP) tidak hanya diperuntukkan bagi mahasiswa, tetapi juga mencakup program untuk siswa di tingkat pendidikan dasar dan menengah. KIP terbagi menjadi dua kategori utama: KIP untuk siswa (yang dikenal sebagai Program Indonesia Pintar atau PIP) dan KIP Kuliah untuk mahasiswa. PIP memberikan bantuan finansial kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk membantu biaya pendidikan di tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK. Bantuan ini berupa dana tunai yang disalurkan langsung ke rekening siswa yang memenuhi syarat. KIP berfungsi sebagai kartu identitas bagi siswa yang berhak menerima bantuan dari PIP. KIP diperlukan untuk mengakses dana PIP dan diberikan kepada siswa yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

2. Yayasan dan Sumbangan Masyarakat

Masyarakat dapat berkontribusi melalui sumbangan, zakat, dan wakaf untuk mendukung pendidikan⁹. Yayasan pendidikan sering kali mengumpulkan dana dari donatur untuk membiayai operasional sekolah, memberikan beasiswa kepada siswa yang kurang mampu, dan meningkatkan fasilitas pendidikan. Zakat dan wakaf juga memainkan peran penting dalam pembiayaan pendidikan Islam, karena dana ini dapat digunakan untuk membangun sekolah, menyediakan beasiswa, dan mendukung kegiatan pendidikan lainnya.

⁸ Miska Rosa Diana, Ferdian Ferdian, and Munir Munir, "Pengembangan Sumber Dan Alokasi Pendanaan Pendidikan Islam," *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 9, no. 3 (2023): 1687-92, <https://doi.org/10.58258/jime.v9i3.5398>.

⁹ Munir, "Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Perspektif Islam."

3. Biaya Personal

Biaya personal adalah biaya yang dikeluarkan oleh peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran secara teratur¹⁰ juga merupakan sumber pembiayaan yang signifikan. Seperti uang pendaftaran dan spp (sumbangan dana pendidikan). SPP atau Sumbangan Pembinaan Pendidikan, adalah biaya yang dibayarkan oleh orang tua atau wali siswa untuk mendukung operasional lembaga pendidikan, seperti sekolah atau madrasah. SPP digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk gaji guru, pengadaan bahan ajar, dan pemeliharaan fasilitas pendidikan.

Dengan kombinasi sumber pembiayaan ini, pendidikan Islam dapat terus berkembang, memberikan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat, serta memastikan akses pendidikan berkualitas yang berkelanjutan dan inklusif bagi semua lapisan masyarakat, sehingga menciptakan generasi yang berilmu dan berakhlak mulia.

Komponen Pembiayaan

Pembiayaan pendidikan Islam terdiri dari beberapa komponen penting yang memastikan kelancaran dan kualitas proses pendidikan.

1. Biaya Investasi

Biaya investasi mencakup pengeluaran yang digunakan untuk penyediaan sarana dan prasarana. Biaya ini bersifat jangka panjang dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas lembaga pendidikan. Meliputi pengadaan sarana dan prasarana serta pengembangan sumber daya manusia. Sarana dan prasarana mencakup pembangunan gedung sekolah, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas olahraga. Pengembangan sumber daya manusia mencakup pelatihan dan peningkatan kompetensi guru serta tenaga kependidikan lainnya. Investasi ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung proses pembelajaran yang efektif.

Pembangunan gedung sekolah yang modern dan dilengkapi dengan fasilitas yang memadai sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan aman bagi siswa. Laboratorium yang dilengkapi dengan peralatan canggih memungkinkan siswa untuk melakukan eksperimen dan praktik secara langsung, sehingga meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi pelajaran. Perpustakaan yang lengkap dengan koleksi buku yang beragam juga sangat penting untuk mendukung proses belajar mengajar. Selain itu, fasilitas olahraga yang memadai dapat membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan fisik dan menjaga kesehatan mereka.

Investasi dalam sarana dan prasarana serta pengembangan sumber daya manusia memiliki manfaat jangka panjang yang signifikan. Dengan fasilitas yang memadai dan tenaga pengajar yang kompeten, lembaga pendidikan dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang mereka tawarkan. Hal ini tidak hanya

¹⁰ Febriani, Syaifuddin, and Syafaruddin, "Kebijakan Pemerintah Tentang Standar Pembiayaan Pendidikan Agama Islam."

meningkatkan prestasi akademik siswa, tetapi juga membantu mereka untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk sukses di masa depan. Selain itu, investasi ini juga dapat meningkatkan reputasi lembaga pendidikan, sehingga menarik lebih banyak siswa dan dukungan dari masyarakat.

Dengan demikian, biaya investasi merupakan komponen penting dalam pembiayaan pendidikan yang harus dikelola dengan baik untuk memastikan keberlanjutan dan kualitas pendidikan yang tinggi.

2. Biaya Operasional

Biaya operasional adalah pengeluaran yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari lembaga pendidikan. Termasuk gaji guru dan biaya sehari-hari lainnya yang diperlukan untuk menjalankan lembaga pendidikan. Gaji guru dan staf administrasi merupakan komponen terbesar dalam biaya operasional. Kesejahteraan guru sangat penting untuk memastikan mereka termotivasi dan mampu memberikan pengajaran yang berkualitas. Gaji yang layak juga membantu dalam menarik dan mempertahankan tenaga pengajar yang berkualitas. Selain gaji, tunjangan dan insentif juga dapat diberikan untuk meningkatkan motivasi dan kinerja guru.

Biaya operasional juga mencakup pengeluaran untuk kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ini penting untuk pengembangan keterampilan siswa di luar akademik, seperti olahraga, seni, dan organisasi siswa. Kegiatan ekstrakurikuler membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial, kepemimpinan, dan kreativitas. Selain itu, biaya operasional juga mencakup perawatan dan pemeliharaan fasilitas sekolah, seperti listrik, air, dan kebersihan. Biaya ini juga digunakan untuk pengadaan bahan ajar, alat tulis, dan perlengkapan belajar lainnya yang diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran. Untuk sekolah yang menyediakan transportasi atau akomodasi bagi siswa, biaya operasional juga mencakup pengeluaran untuk transportasi dan pemeliharaan asrama. Transportasi yang aman dan nyaman serta akomodasi yang layak sangat penting untuk memastikan siswa dapat belajar dengan baik.

Biaya operasional yang memadai memastikan bahwa lembaga pendidikan dapat berfungsi dengan baik dan memberikan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa. Dengan pengelolaan yang baik, biaya operasional dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Lembaga pendidikan perlu memastikan bahwa setiap pengeluaran dilakukan dengan efisien dan efektif untuk mendukung tujuan pendidikan.

3. Biaya Personal

Biaya personal adalah pengeluaran yang dikeluarkan oleh peserta didik atau orang tua siswa untuk mendukung pendidikan anak mereka. Biaya ini mencakup uang sekolah, biaya buku, seragam, alat tulis, dan kebutuhan belajar lainnya. Uang sekolah merupakan kontribusi rutin yang harus dibayarkan oleh orang tua siswa setiap bulan atau semester. Ini adalah salah satu komponen utama biaya personal dan digunakan untuk membiayai operasional lembaga pendidikan, termasuk gaji guru dan pemeliharaan fasilitas. Buku pelajaran dan alat tulis adalah

kebutuhan dasar bagi setiap siswa. Biaya ini dapat bervariasi tergantung pada kurikulum yang diadopsi oleh lembaga pendidikan. Beberapa lembaga pendidikan Islam menyediakan buku gratis atau dengan harga subsidi untuk membantu meringankan beban biaya ini. Seragam sekolah juga menjadi bagian dari biaya personal yang harus dipenuhi oleh orang tua. Beberapa lembaga pendidikan Islam mungkin memiliki kebijakan untuk menyediakan seragam secara gratis atau dengan biaya yang terjangkau.

Meskipun biaya personal ini dapat menjadi beban bagi beberapa keluarga, banyak lembaga pendidikan Islam yang menyediakan beasiswa atau bantuan keuangan untuk meringankan beban tersebut. Sehingga semua siswa dapat mengakses pendidikan yang layak tanpa terkendala oleh masalah finansial. Dengan demikian, ketiga jenis biaya ini memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi dalam mendukung keberlangsungan dan kualitas pendidikan. Perbedaan utama terletak pada jangka waktu pengeluaran dan tujuan dari masing-masing biaya tersebut dalam mendukung proses pendidikan.

Tantangan dalam Pengelolaan Biaya

1. Keterbatasan Sumber Dana

Lembaga pendidikan Islam, terutama yang berada di daerah pedesaan atau daerah yang kurang berkembang, seringkali menghadapi keterbatasan sumber daya finansial. Hal ini membuat mereka kesulitan dalam meningkatkan fasilitas fisik, mengembangkan kurikulum yang diperbarui, dan membayar gaji guru dan staf administrasi dengan layak. Keterbatasan ini juga berdampak pada kemampuan lembaga untuk menyediakan bahan ajar yang berkualitas dan teknologi pendidikan yang memadai. Selain itu, kurangnya dana sering kali menghambat pelaksanaan program ekstrakurikuler yang penting untuk pengembangan keterampilan siswa di luar akademik.

Keterbatasan sumber dana juga mempengaruhi kemampuan lembaga pendidikan Islam untuk memberikan beasiswa kepada siswa yang kurang mampu. Tanpa dukungan finansial yang memadai, banyak siswa berbakat yang mungkin tidak dapat melanjutkan pendidikan mereka. Hal ini pada akhirnya dapat memperlebar kesenjangan pendidikan antara siswa dari latar belakang ekonomi yang berbeda.

2. Biaya Pendidikan yang Tinggi

Biaya pendidikan yang tinggi menjadi hambatan bagi banyak keluarga yang ingin mendaftarkan anak-anak mereka ke lembaga pendidikan Islam. Akibatnya, aksesibilitas pendidikan menjadi masalah serius, terutama bagi keluarga dengan tingkat pendapatan rendah. Biaya yang tinggi mencakup berbagai aspek, seperti uang sekolah, biaya buku, seragam, dan kegiatan ekstrakurikuler. Selain itu, biaya transportasi dan akomodasi bagi siswa yang tinggal jauh dari sekolah juga menambah beban finansial bagi keluarga.

Keterbatasan finansial ini sering kali memaksa keluarga untuk memilih antara kebutuhan dasar dan pendidikan anak-anak mereka. Hal ini dapat mengakibatkan rendahnya tingkat partisipasi pendidikan di kalangan masyarakat berpenghasilan

rendah, yang pada gilirannya memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi. Selain itu, biaya pendidikan yang tinggi juga dapat menghambat pengembangan potensi siswa yang berbakat tetapi tidak mampu secara finansial.

3. Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas

Pengelolaan dana yang baik memerlukan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Namun, lembaga pendidikan Islam terkadang menghadapi masalah dalam melacak dan melaporkan penggunaan dana dengan tepat. Kurangnya transparansi dapat menyebabkan kekhawatiran dan ketidakpercayaan dari para donatur dan masyarakat secara umum¹¹. Ketika laporan keuangan tidak disusun dengan jelas dan tidak diaudit secara independen, hal ini dapat menimbulkan kecurigaan bahwa dana tidak digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain itu, kurangnya akuntabilitas juga dapat menghambat upaya penggalangan dana di masa depan. Donatur dan masyarakat cenderung lebih berhati-hati dalam memberikan sumbangan jika mereka merasa bahwa dana tersebut tidak dikelola dengan baik. Hal ini dapat mengurangi jumlah dana yang tersedia untuk operasional dan pengembangan lembaga pendidikan Islam.

4. Efisiensi dalam Pengelolaan Dana

Lembaga pendidikan Islam harus mampu mengelola dana dengan efisien dan efektif. Ini melibatkan perencanaan keuangan yang cermat, pemantauan pengeluaran, dan penilaian terhadap kelayakan program-program yang didanai. Pengelolaan dana yang buruk dapat menyebabkan pemborosan dan penurunan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, penting bagi lembaga pendidikan untuk memiliki sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel.

5. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kualitas pengelolaan dana tidak hanya tergantung pada sistem dan prosedur, tetapi juga pada kemampuan staf administrasi dalam mengelola dana dengan baik. Lembaga pendidikan Islam perlu berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapabilitas pengelolaan keuangan mereka. Pelatihan yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa staf memiliki keterampilan dan pengetahuan terbaru dalam manajemen keuangan. Ini termasuk pelatihan dalam penggunaan teknologi keuangan, analisis data, dan praktik terbaik dalam pengelolaan dana. Pelatihan yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa staf memiliki keterampilan dan pengetahuan terbaru dalam manajemen keuangan. Ini termasuk pelatihan dalam penggunaan teknologi keuangan, analisis data, dan praktik terbaik dalam pengelolaan dana.

¹¹ Pangestu Aji Swasono, "Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Islam," *Sustainability (Switzerland)*, 2023, https://www.academia.edu/113499837/PENGLOLAAN_PEMBIAYAAN_PENDIDIKAN_ISLAM.

Selain pelatihan teknis, pengembangan sumber daya manusia juga mencakup peningkatan keterampilan manajerial dan kepemimpinan. Staf yang memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik dapat mengelola tim dengan lebih efektif dan membuat keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan dana. Program pengembangan kepemimpinan dapat mencakup pelatihan dalam komunikasi, pengambilan keputusan, dan manajemen konflik.

Investasi dalam pengembangan sumber daya manusia juga dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja staf. Staf yang merasa dihargai dan didukung dalam pengembangan karir mereka cenderung lebih termotivasi dan berkomitmen terhadap pekerjaan mereka. Ini dapat berdampak positif pada efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana di lembaga pendidikan.

Solusi untuk Mengatasi Permasalahan Pembiayaan

Untuk mengatasi permasalahan pembiayaan pendidikan Islam, beberapa solusi strategis dapat diterapkan. Berikut adalah penjelasan lebih mendalam mengenai setiap solusi yang diusulkan.

1. Diversifikasi Sumber Pembiayaan

Diversifikasi sumber pembiayaan merupakan langkah penting untuk mengurangi risiko yang terkait dengan ketergantungan pada satu sumber dana. Dalam konteks pendidikan Islam, hal ini dapat mencakup :

a. Penggalangan Dana dari Masyarakat

Melibatkan masyarakat melalui sumbangan sukarela, baik dalam bentuk uang maupun barang. Program-program seperti crowdfunding atau kampanye sosial dapat dilakukan untuk mengajak masyarakat berpartisipasi. Crowdfunding merupakan metode pengumpulan dana yang melibatkan kontribusi dari banyak individu melalui platform online. Dalam konteks pendidikan Islam, crowdfunding dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti pembangunan fasilitas pendidikan atau penyediaan beasiswa bagi siswa berprestasi yang kurang mampu¹². Crowdfunding memberikan akses kepada institusi pendidikan untuk mendapatkan dana dari komunitas yang lebih luas, termasuk individu yang mungkin tidak memiliki akses ke lembaga keuangan tradisional¹³.

Selain itu, crowdfunding juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, di mana setiap kontribusi dapat dilacak dan donor dapat melihat perkembangan proyek yang mereka dukung, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan dana. Lebih jauh lagi, melalui crowdfunding, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mendukung pendidikan, yang pada gilirannya memperkuat hubungan antara sekolah dan komunitas lokal. Dengan demikian,

¹² Akhmad Faris Aprilio and Fitri Utami, "Analisis Hukum Islam Terkait Pemotongan Biaya Administrasi Dan Security Pendonasian Pada Crowdfunding Kitabisa," *Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan* 15 (2024).

¹³ Ricky Firmansyah et al., "Crowdfunding Dalam Islam : Prinsip , Praktik , Dan Implementasi" 5, no. 2 (2024): 4709-18.

crowdfunding tidak hanya menjadi sumber dana, tetapi juga sarana pemberdayaan komunitas dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan¹⁴.

b. Kemitraan dengan Sektor Swasta

Berdasarkan strategi diversifikasi sumber pembiayaan, kemitraan dengan sektor swasta merupakan salah satu cara efektif untuk mendukung pendidikan Islam. Kerja sama dengan perusahaan dan lembaga swasta yang memiliki tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility - CSR) dapat membawa manfaat signifikan bagi institusi pendidikan.

Kerja sama dengan sektor swasta juga membuka pintu bagi siswa untuk meraih kesempatan magang dan peluang karir awal yang berkualitas. Ini tidak saja membuat lulusan lebih siap menghadapi dunia industri secara profesional, tapi juga meningkatkan potensi alumni untuk bersaing di pasar tenaga kerja global. Selain itu, kemitraan ini juga dapat meningkatkan reputasi institusi pendidikan karena telah berhasil menjalin kerja sama strategis dengan perusahaan-perusahaan ternama. Hal ini akan semakin meningkatkan minat orang tua untuk meletakkan anak-anak mereka di institusi tersebut karena yakin bahwa anak-anak mereka akan mendapatkan edukasi yang lengkap dan relevan dengan tuntutan zaman modern.

Dengan demikian, kemitraan dengan sektor swasta tidak hanya bertujuan untuk membiayai kebutuhan fisik dan materi, namun juga untuk meningkatkan nilai tambah intelektual dan profesionalisme para siswanya. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak baik itu pemerintah, organisasi non-pemerintahan, maupun perusahaan swasta melakukan usaha-usaha serius untuk membangun struktur kolaboratif yang kuat guna mendukung visi misi pendidikan islam yang maju dan bermartabat.

c. Wakaf dan Zakat

Salah satu pendekatan yang sangat penting dalam diversifikasi sumber pembiayaan pendidikan Islam adalah memanfaatkan potensi wakaf dan zakat secara optimal. Kedua instrumen ini tidak hanya memiliki nilai spiritual, tetapi juga dapat menjadi sumber daya yang signifikan untuk mendukung pengembangan pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Memanfaatkan potensi wakaf dan zakat secara optimal. Misalnya, wakaf dapat digunakan untuk membangun gedung sekolah atau menyediakan beasiswa bagi siswa kurang mampu. Dengan demikian, dana yang terkumpul dari berbagai sumber dapat digunakan secara efektif dan berkelanjutan. Wakaf, sebagai sumbangan yang diberikan oleh individu atau kelompok untuk tujuan sosial yang bersifat permanen, dapat digunakan untuk berbagai keperluan dalam konteks pendidikan. Misalnya, dana wakaf dapat dialokasikan untuk membangun gedung sekolah, fasilitas belajar, laboratorium, atau perpustakaan. Adanya infrastruktur

¹⁴ Rahmad Fuad and Hamdi Abdul Karim, "Peran Crowdfunding Dalam Mendukung Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di SDN 02 Aur Kuning," *Maslahah: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 2, no. 3 (2024).

yang memadai, proses pembelajaran dapat berlangsung dengan lebih efektif dan nyaman, sehingga meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Selain itu, wakaf juga bisa digunakan untuk menyediakan beasiswa bagi siswa kurang mampu. Dengan memberikan akses pendidikan kepada mereka yang tidak mampu secara finansial, wakaf berperan penting dalam menciptakan kesetaraan kesempatan belajar dan membantu mengurangi angka putus sekolah. Dana wakaf juga dapat dialokasikan untuk pengembangan kurikulum yang lebih relevan dan inovatif serta program pelatihan bagi guru, memastikan bahwa pendidikan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan zaman dan dapat mempersiapkan siswa menghadapi tantangan di masa depan.

Di sisi lain, zakat, sebagai kewajiban bagi umat Muslim, juga memiliki potensi besar dalam mendukung pendidikan. Zakat dapat digunakan untuk memberikan bantuan langsung kepada siswa yang membutuhkan, seperti biaya sekolah, buku, dan alat tulis. Ini akan meringankan beban keluarga yang kurang mampu dan memastikan anak-anak mereka tetap mendapatkan pendidikan. Selain itu, zakat juga bisa dialokasikan untuk program-program pendidikan khusus, seperti pelatihan keterampilan bagi remaja atau program literasi bagi orang dewasa. Dengan demikian, zakat tidak hanya mendukung pendidikan formal tetapi juga meningkatkan kemampuan masyarakat secara keseluruhan. Seperti halnya wakaf, zakat juga bisa digunakan untuk membangun fasilitas pendidikan seperti ruang kelas tambahan atau tempat bermain bagi anak-anak, sehingga investasi dalam infrastruktur ini akan memberikan dampak jangka panjang terhadap kualitas pendidikan.

Dengan memanfaatkan potensi wakaf dan zakat secara optimal, institusi pendidikan Islam tidak hanya akan mendapatkan sumber pembiayaan yang berkelanjutan tetapi juga akan berkontribusi pada pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Ini adalah langkah strategis untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas tinggi bagi semua lapisan masyarakat.

2. Peningkatan Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performannya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggungjawabnya¹⁵. Meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat. Beberapa langkah yang dapat diambil meliputi :

a. Transparansi Laporan Keuangan

Menyediakan laporan keuangan yang jelas dan terperinci kepada publik mengenai penggunaan dana. Ini termasuk rincian pengeluaran dan penerimaan, sehingga masyarakat dapat melihat bagaimana dana dikelola.

b. Audit Independen

¹⁵ Ulfa Dj. Nurkamiden and Herson Anwar, "Konsep Manajemen Pembiayaan Pendidikan Pada Lembaga Pendidikan Islam," *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 11, no. 1 (2023): 53-64, <https://doi.org/10.30603/tjmpi.viii.3384>.

Mengadakan audit oleh pihak ketiga yang independen untuk memastikan bahwa pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas. Hasil audit harus diumumkan kepada publik agar masyarakat mengetahui status keuangan lembaga pendidikan. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam penyediaan laporan keuangan :

1) Rincian Pengeluaran

Laporan keuangan harus mencakup rincian pengeluaran yang dilakukan oleh lembaga pendidikan. Ini termasuk biaya operasional, gaji guru dan staf, pengembangan fasilitas, serta program-program tambahan seperti kegiatan ekstrakurikuler. Dengan memberikan rincian yang jelas, masyarakat dapat memahami bagaimana dana digunakan dan memastikan bahwa pengeluaran tersebut sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

2) Rincian Penerimaan

Selain pengeluaran, laporan keuangan juga harus mencakup rincian penerimaan dana. Ini termasuk sumber-sumber pendanaan seperti sumbangan masyarakat, zakat, wakaf, sponsor dari sektor swasta, dan pendapatan lain yang diperoleh lembaga.

3) Transparansi dalam Pengelolaan Dana

Transparansi dalam pengelolaan dana adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik. Dengan menyediakan laporan keuangan yang terperinci, lembaga pendidikan menunjukkan komitmennya terhadap akuntabilitas. Masyarakat dapat melihat secara langsung bagaimana dana dikelola dan digunakan untuk kepentingan pendidikan.

Adanya laporan keuangan yang jelas dan terperinci kepada publik mengenai penggunaan dana, lembaga pendidikan Islam dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitasnya. Rincian pengeluaran dan penerimaan tidak hanya membantu masyarakat memahami bagaimana dana dikelola, tetapi juga membangun kepercayaan yang lebih besar antara lembaga pendidikan dan komunitasnya. Dengan demikian, langkah ini sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dukungan masyarakat terhadap pendidikan Islam serta meningkatkan kualitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.

c. Keterlibatan Masyarakat

Mengajak masyarakat untuk terlibat dalam proses pengawasan penggunaan dana dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan membentuk komite pengawas yang terdiri dari anggota masyarakat. Komite ini bertugas untuk memantau dan memberikan masukan terkait pengelolaan dana, serta memastikan bahwa alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan nyata lembaga pendidikan. Keterlibatan masyarakat tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan, tetapi juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam pengembangan pendidikan di lingkungan mereka.

3. Pengembangan Rencana Pembiayaan

Membuat rencana pembiayaan yang komprehensif adalah langkah krusial dalam memastikan penggunaan dana yang efisien dan efektif. Rencana ini mencakup :

a. Identifikasi Kebutuhan Dana

Pertama, identifikasi kebutuhan dana memerlukan analisis mendalam terhadap berbagai komponen biaya yang diperlukan oleh lembaga pendidikan, termasuk biaya operasional seperti listrik dan pemeliharaan fasilitas, gaji guru dan staf, investasi dalam infrastruktur pendidikan seperti ruang kelas dan laboratorium, serta alokasi dana untuk program ekstrakurikuler yang mendukung pengembangan siswa di luar kurikulum utama. Menurut Murniati, perencanaan anggaran yang baik harus berdasarkan pada analisis kebutuhan yang komprehensif, termasuk perhitungan biaya operasional dan investasi ¹⁶.

b. Perencanaan Jangka Pendek dan Panjang

Perencanaan jangka pendek dan panjang harus mencakup dua dimensi waktu. Rencana jangka pendek berfokus pada kebutuhan saat ini, seperti biaya operasional tahunan dan gaji, dengan proyeksi yang akurat untuk memastikan semua kebutuhan mendesak dapat terpenuhi. Sementara itu, perencanaan jangka panjang melibatkan proyeksi biaya di masa depan dan strategi untuk mengatasi fluktuasi pendanaan, termasuk rencana investasi dalam infrastruktur baru atau program pendidikan yang lebih baik. Pengelolaan keuangan yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan secara optimal dan tepat sasaran ¹⁷.

c. Strategi Penggunaan Dana

Strategi penggunaan dana harus dirumuskan dengan jelas agar setiap aspek pendidikan mendapatkan perhatian yang cukup. Ini mencakup penentuan prioritas pengeluaran berdasarkan hasil evaluasi kebutuhan serta alokasi anggaran yang dilakukan secara adil sesuai dengan prioritas pendidikan yang telah ditetapkan. Sistem informasi seperti Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dapat membantu dalam proses ini dengan memfasilitasi penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban dana. Dengan pendekatan terstruktur ini, lembaga pendidikan dapat memastikan bahwa semua aspek operasionalnya dikelola dengan baik, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan ¹⁸.

Dengan menerapkan solusi-solusi ini secara sistematis, diharapkan permasalahan pembiayaan pendidikan Islam dapat diatasi dengan lebih efektif, sehingga akses terhadap pendidikan berkualitas dapat ditingkatkan bagi seluruh lapisan masyarakat.

¹⁶ Sukatin Sukatin et al., "Manajemen Keuangan Atau Pembiayaan Pendidikan," *Pedagogika: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan* 3, no. 2 (2023): 277-82, <https://doi.org/10.57251/ped.v3i2.1374>.

¹⁷ Haikal Adriansyah and Maftuhah Maftuhah, "Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Poris Pelawad 5 Kota Tangerang," *Al-Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam* 7, no. 1 (2023): 1-24, <https://doi.org/10.54437/alidaroh.v7i1.623>.

¹⁸ Hasna Afifah and Mulyawan Safwandy Nugraha, "Implementasi Manajemen Pembiayaan Di Lembaga Pendidikan Madrasah Tsanawiyah Manarulhuda Cianjur" 2, no. 1 (2024): 25-34, <https://journal.albadar.ac.id/index.php/JPICIPULUS/index>.

KESIMPULAN

Pembiayaan pendidikan Islam di Indonesia merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, yang diatur oleh berbagai peraturan hukum seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 69 Tahun 2009, yang memastikan alokasi dana yang memadai untuk pendidikan berkualitas. Sumber pembiayaan ini meliputi dana pemerintah, yayasan, sumbangan masyarakat, dan biaya personal dari peserta didik, yang semuanya berkontribusi pada pengembangan infrastruktur, gaji guru, dan kebutuhan operasional lainnya. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber dana, biaya pendidikan yang tinggi, serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana masih harus diatasi. Oleh karena itu, diversifikasi sumber pembiayaan, peningkatan akuntabilitas, dan pengembangan rencana pembiayaan yang komprehensif menjadi solusi penting untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan Islam. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pendidikan Islam dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi signifikan bagi masyarakat serta menciptakan generasi yang berilmu dan berakhlak mulia.

REFERENSI

- Adriansyah, Haikal, and Maftuhah Maftuhah. "Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Poris Pelawad 5 Kota Tangerang." *Al-Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam* 7, no. 1 (2023): 1-24. <https://doi.org/10.54437/alidaroh.v7i1.623>.
- Afifah, Hasna, and Mulyawan Safwandy Nugraha. "Implementasi Manajemen Pembiayaan Di Lembaga Pendidikan Madrasah Tsanawiyah Manarulhuda Cianjur" 2, no. 1 (2024): 25-34. <https://journal.albadar.ac.id/index.php/JPICIPULUS/index>.
- Aprilio, Akhmad Faris, and Fitri Utami. "Analisis Hukum Islam Terkait Pemotongan Biaya Administrasi Dan Security Pendonasian Pada Crowdfunding Kitabisa." *Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan* 15 (2024).
- Diana, Miska Rosa, Ferdian Ferdian, and Munir Munir. "Pengembangan Sumber Dan Alokasi Pendanaan Pendidikan Islam." *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 9, no. 3 (2023): 1687-92. <https://doi.org/10.58258/jime.v9i3.5398>.
- Febriani, Eva, Muhammad Syaifuddin, and Syafaruddin Syafaruddin. "Kebijakan Pemerintah Tentang Standar Pembiayaan Pendidikan Agama Islam." *Journal of Islamic Education El Madani* 2, no. 2 (2023): 114-20. <https://doi.org/10.55438/jiee.v2i2.65>.
- Firmansyah, Ricky, Nanang Hunaifi, Yunika Komalasari, and R Dewi Sulastriningsih. "Crowdfunding Dalam Islam : Prinsip , Praktik , Dan Implementasi" 5, no. 2 (2024): 4709-18.
- Fuad, Rahmad, and Hamdi Abdul Karim. "Peran Crowdfunding Dalam Mendukung Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di SDN 02 Aur Kuning." *Maslahah: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 2, no. 3 (2024).
- Munir, Ahmad. "Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Perspektif Islam." *At-Ta'dib* 8, no. 2 (2013): 138-48. <https://doi.org/10.21111/at-tadib.v8i2.502>.

- Nurkamiden, Ulfa Dj., and Herson Anwar. "Konsep Manajemen Pembiayaan Pendidikan Pada Lembaga Pendidikan Islam." *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 11, no. 1 (2023): 53–64. <https://doi.org/10.30603/tjmpi.v11i1.3384>.
- Ramadhani, Adinda Fitri, and Saifuddin. "Manajemen Pembiayaan Dalam Pendidikan Islam." *International Seminar On Islamic ...* 3 (2023): 129–39. <https://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/isiep/article/view/3860>
<https://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/isiep/article/download/3860/2446>.
- Sukatin, Sukatin, Siti Rukmanah, Rosanti Rosanti, and Hafizul Karim. "Manajemen Keuangan Atau Pembiayaan Pendidikan." *Pedagogika: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan* 3, no. 2 (2023): 277–82. <https://doi.org/10.57251/ped.v3i2.1374>.
- Swasono, Pangestu Aji. "Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Islam." *Sustainability (Switzerland)*, 2023. https://www.academia.edu/113499837/PENGELOLAAN_PEMBIAYAAN_PENDIDIKAN_ISLAM.
- Warmanto, Edi. "Pembiayaan Pendidikan Islam." *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 1 (2024): 29–37.